



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
TAHUN 2025**



**KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) maka diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan efektif yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran guna perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan pada tahun yang akan datang.

Pekalongan, 25 Februari 2026

CAMAT PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN



SUMADI, S.I.P.
Pejabat Tingkat I
NIP. 19631217 199103 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025. Kecamatan Pekalongan Selatan pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 2 (dua) indikator kinerja, dan 2 (dua) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pekalongan Selatan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Kecamatan Pekalongan Selatan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pekalongan Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 76,00.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Kecamatan Pekalongan Selatan sebesar 77,15 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai SAKIP sebesar 101,51%.

2. Indikator Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum dengan capaian kinerja 100% dari target 100% tercapai 100%. Capaian tersebut dapat dilihat dari capaian rata-rata program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Kinerja keuangan Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 11.609.239.018,00,- atau 91,21% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 12.727.958.000,00,-.

Capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

Adapun kendala yang dihadapi Kecamatan Pekalongan Selatan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain:

1. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan.

Langkah kedepan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diatas yaitu:

1. Mengoptimalkan sistem manajemen, kinerja organisasi dan pemanfaatan sumber daya yang ada.
2. Melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Kondisi Aparatur	13
1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana	16
1.5 Isu Strategis	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026	20
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026	24
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Pengukuran Kinerja	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
3.3 Akuntabilitas Keuangan	48
3.4 Prestasi yang Diraih	52
3.5 Inovasi	58
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja	61
4.2 Permasalahan dan Langkah Kedepan	62
LAMPIRAN	
Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026	
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Pekalongan Selatan 4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Kelurahan 10
Gambar 3.1	Piagam Penghargaan dalam Pengawasan Internal Kearsipan ... 53
Gambar 3.2	Piagam Penghargaan Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 54
Gambar 3.3	Piagam Penghargaan Lomba Kampung KB Tingkat Nasional 54
Gambar 3.4	Piagam Penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan 54
Gambar 3.5	Piagam Penghargaan Lomba Apresiasi Rumah Dataku (Kategori Digital) 55
Gambar 3.6	Piagam Penghargaan Lomba Evaluasi dan Pembinaan/Lomba Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) Sinergi dan Kolaborasi dengan KRPPA 55
Gambar 3.7	Piagam Penghargaan Lomba Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) 56
Gambar 3.8	Piagam Penghargaan Lomba Beberan “2025” Pola Asuh Anak dan Remaja 57
Gambar 3.9	Piagam Penghargaan Lomba Bank Sampah dan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) 57
Gambar 3.10	Piagam Penghargaan Lomba TPS3R 58
Gambar 3.11	Podcast Kidulane 59
Gambar 3.12	Platform PAPKESEL 59
Gambar 3.13	SIJEMPOL BuraDen 60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Data Pegawai Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin 13
Tabel 1.2	Data Pegawai Kecamatan Berdasarkan Pendidikan 14
Tabel 1.3	Data Pegawai Kecamatan Berdasarkan Golongan Ruang 14
Tabel 1.4	Data Pegawai Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin 15
Tabel 1.5	Data Pegawai Kelurahan Berdasarkan Pendidikan 15
Tabel 1.6	Data Pegawai Kelurahan Berdasarkan Golongan Ruang 16
Tabel 1.7	Sarana dan Prasarana Tahun 2025 17
Tabel 2.1	Matriks Perencanaan Kinerja Tahun 2025 21
Tabel 2.2	Target Sasaran Kinerja Tahun 2021-2026 24
Tabel 2.3	Target Sasaran Kinerja Tahun 2021-2026 25
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 26
Tabel 3.1	Pengukuran dengan Skala Ordinal 32
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Tahun 2025 32
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya 33
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026 33
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional 34
Tabel 3.6	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 34
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 35
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 35
Tabel 3.9	Rincian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 36
Tabel 3.10	Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 36
Tabel 3.11	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 42
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Guna mencapai hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan sebagaimana institusi pemerintahan daerah lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sedangkan untuk proses evaluasi terhadap SAKIP, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Pekalongan Selatan merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang kewilayahan di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah.

A. Geografis

- a. Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di dataran rendah dengan ketinggian 13 m/dpl;
- b. Temperatur rata-rata 32°C, dengan jumlah curah hujan rata-rata dalam setahun berkisar 2.233 mm/th;
- c. Kecamatan Pekalongan Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang letaknya di sebelah Selatan pusat Pemerintahan Kota Pekalongan;
- d. Luas wilayah Kecamatan 10,89 km² dan dilalui oleh 1 (satu) sungai besar yaitu Sungai Kupang;
- e. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Pemerintah Kota \pm 4 Km, dan dengan Ibukota Provinsi \pm 103 Km;
- f. Adapun Batas-batas Kecamatan:
 - Sebelah Utara : Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur
 - Sebelah Timur : Kabupaten Batang
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan
 - Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok kecamatan adalah membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
2. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
3. Pengoordinasian pengelolaan kesekretariatan di Kecamatan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
8. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat;
11. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
12. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

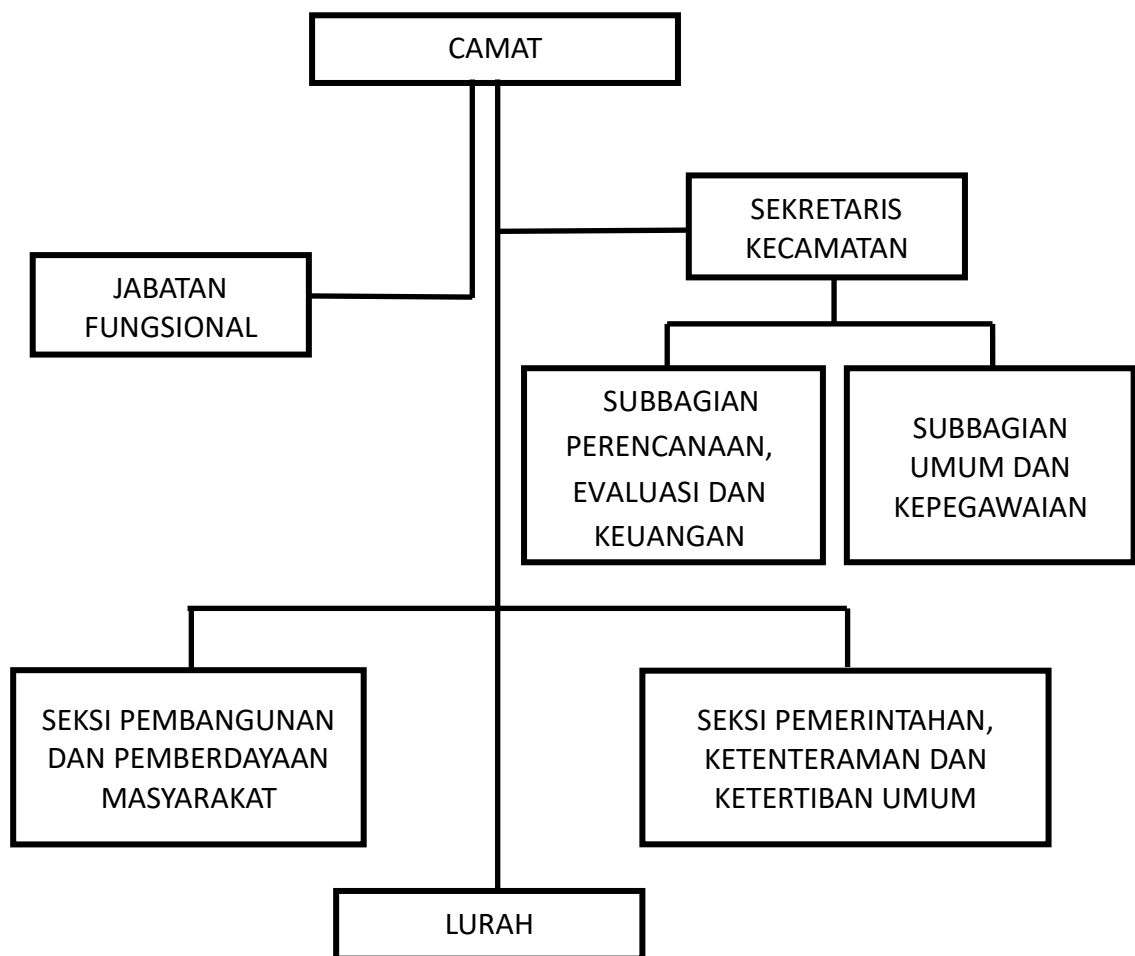
C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a. Camat;

- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Kelurahan terdiri atas:
 - 1) Lurah;
 - 2) Sekretaris Kelurahan;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum; dan
 - 4) Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.
- f. Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Pekalongan Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pekalongan Selatan

Sebagaimana Gambar 1.1, masing-masing unsur dari organisasi Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

a. Tugas:

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan;
- 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Kecamatan;
- 3) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- 4) Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- 5) Pembinaan pengelolaan administrasi umum Kecamatan;
- 6) Pembinaan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- 7) Pembinaan pengelolaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
- 8) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah Kecamatan;
- 9) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Kecamatan;
- 10) Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- 11) Pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP);
- 12) Pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan;
- 13) Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

14) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsinya.

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan;
- 2) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan dokumen RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- 4) Melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- 5) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- 6) Mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
- 8) Menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- 9) Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- 2) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- 4) Mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
- 5) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- 6) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- 7) Mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya;
- 9) Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 10) Mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan; dan
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

a. Tugas:

- 1) Menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Menyusun bahan kebijakan bidang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan Kecamatan;
- 4) Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan;
- 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- 6) Mengoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- 7) Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 8) Melaksanakan upaya peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga;
- 9) Melaksanakan fasilitasi bantuan dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial;
- 10) Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

a. Tugas:

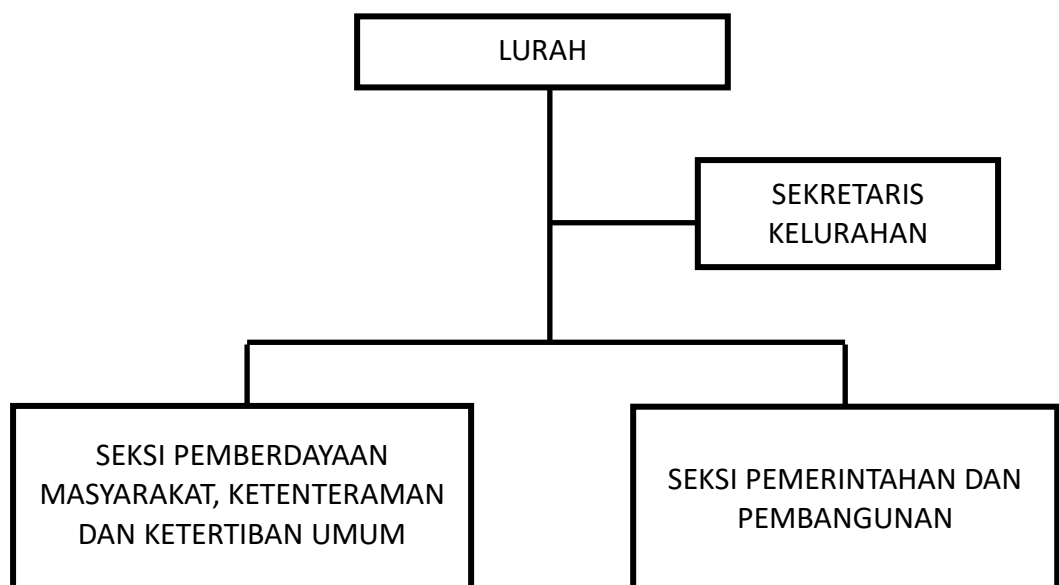
- 1) Menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- 2) Menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan non perizinan;
- 6) Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan di wilayah Kecamatan;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dengan POLRI, TNI, dan/atau instansi terkait di wilayah Kecamatan;
- 8) Mengoordinasikan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum.

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Struktur organisasi kelurahan

terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum;
dan
- d. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan.

Adapun bagan struktur organisasi Kelurahan dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagaimana Gambar 1.2, masing-masing unsur dari organisasi Kelurahan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Lurah

Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menetapkan program kerja Kelurahan;
- b. Menyusun kebijakan pemerintahan Kelurahan;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan kesekretariatan di Kelurahan;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana

- prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kelurahan;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - h. Mengoordinasikan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
 - i. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - j. Melaksanakan pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan sasaran, program, dan kegiatan Kelurahan;
- b. Menyusun bahan kebijakan Kelurahan;
- c. Melaksanakan evaluasi kinerja Kelurahan;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- f. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan peralatan, dan perlengkapan kantor;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan peralatan rumah tangga;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan logistik kantor;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- m. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pelayanan umum

- kantor;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - q. Mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip;
 - r. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - s. Mengoordinasikan dan menyusun bahan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, dan Evaluasi Kelembagaan; dan
 - t. Mengendalikan, membina, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
 - b. Menyusun bahan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat;
 - c. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
 - f. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

4. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan

Seksi Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Seksi Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan perencanaan program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;
- b. Menyusun bahan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan sarana prasarana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan;
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan rutin langsung kepada masyarakat;
- e. Melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- f. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- g. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas umum di Kelurahan;
- h. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

1.3. Kondisi Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Selatan didukung oleh personil sebanyak 16 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pegawai Kecamatan Pekalongan Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	PNS			
1.	Camat	1	-	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	1 orang
3.	Kepala Seksi	1	1	2 orang
4.	Kepala Subbagian	-	2	2 orang
5.	Fungsional Umum	4	3	7 orang

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	PPPK			
1.	Fungsional Umum	1	1	2 orang
2.	Fungsional	-	1	1 orang
Jumlah		7	9	16 orang

Tabel 1.2 Data Pegawai Kecamatan Pekalongan Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	
	PNS							
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	2	-	2
4.	Kepala Subbagian	-	-	-	-	2	-	2
5.	Fungsional Umum	-	-	5	1	1	-	7
	PPPK							
1.	Fungsional Umum	-	-	-	-	2	-	2
2.	Fungsional	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		-	-	5	2	8	1	16

Tabel 1.3 Data Pegawai Kecamatan Pekalongan Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2025

NO	JABATAN	GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	VII	IX	
	PNS							
1.	Camat	-	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	2	-	-	-	2
4.	Kepala Subbagian	-	-	2	-	-	-	2
5.	Fungsional Umum	-	5	2	-	-	-	7
	PPPK							
1.	Fungsional Umum	-	-	-	-	-	2	2
2.	Fungsional	-	-	-	-	1	-	1
Jumlah		-	5	7	1	1	2	16

Sejak tahun 2017 kelurahan bukan lagi berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah, tetapi termasuk satu Perangkat Daerah bersama dengan Kecamatan. Kelurahan-kelurahan yang berada dalam Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Banyurip;
2. Kelurahan Buaran Kradenan;
3. Kelurahan Jenggot;
4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo;
5. Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan
6. Kelurahan Sokoduwet.

Adapun sumber daya kepegawaian yang dimiliki oleh seluruh kelurahan tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Data Pegawai Kelurahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	PNS			
1.	Lurah	6	-	6 orang
2.	Sekretaris Kelurahan	3	3	6 orang
3.	Kepala Seksi	4	7	11 orang
4.	Fungsional Umum	11	4	15 orang
	PPPK			
1.	Fungsional Umum	6	-	6 orang
Jumlah		30	14	44 orang

Tabel 1.5 Data Pegawai Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	
	PNS							
1.	Lurah	-	-	-	-	5	1	6
2.	Sekretaris Kelurahan	-	-	-	1	5	-	6

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	Diploma	SI	S2	
3.	Kepala Seksi	-	-	-	2	8	1	11
4.	Fungsional Umum	-	-	14	-	1	-	15
	PPPK							
1.	Fungsional Umum	-	-	6	-	-	-	6
	Jumlah	-	-	20	3	19	2	44

Tabel 1.6 Data Pegawai Kelurahan Berdasarkan Golongan Tahun 2025

NO	JABATAN	GOLONGAN					JUMLAH
		I	II	III	IV	V	
	PNS						
1.	Lurah	-	-	6	-	-	6
2.	Sekretaris Kelurahan	-	-	6	-	-	6
3.	Kepala Seksi	-	-	11	-	-	11
4.	Fungsional Umum	-	11	4	-	-	15
	PPPK						
1.	Fungsional Umum	-	-	-	-	6	6
	Jumlah	-	11	27	-	6	44

1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana yang digunakan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi dan aktivitas pelayanan masyarakat yaitu meliputi peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Selain aset bergerak, Kecamatan Pekalongan Selatan juga mempunyai aset tidak bergerak berupa tanah seluas 5.420 m² yang saat ini dijadikan sebagai kompleks perkantoran Kecamatan Pekalongan Selatan yang berada di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 353 Pekalongan. Kecamatan Pekalongan Selatan juga mempunyai aset berupa gedung kantor yang cukup representatif.

Secara lengkap, jenis dan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Pekalongan Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.7 berikut ini:

Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana
Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025

No.	Jenis Sarana Prasarana	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
1.	Supra Fit X	2008	12.950.000	Baik
2.	Honda Revo	2009	13.296.600	Baik
3.	Honda Supra X 125	2013	14.449.500	Baik
4.	Honda Supra X 125	2013	14.449.500	Baik
5.	Yamaha Jupiter Z	2014	15.461.176	Baik
6.	Toyota Avanza Veloz	2016	195.880.834	Baik
7.	Mitsubishi/ L300 PU FB-R (4x2)M/T	2023	271.080.000	Baik
8.	Mesin Absensi	2020	4.000.000	Baik
9.	Mesin Potong rumput	2015	4.800.000	Baik
10.	Mesin Potong rumput	2022	5.000.000	Baik
11.	AC Unit (3 unit)	2013	9.719.600	Baik
12.	AC Unit (4 unit) SHARP	2016	20.966.900	Baik
13.	AC Unit (6 unit) SHARP	2019	24.850.000	Baik
14.	AC Unit (3 unit) SHARP	2020	16.100.000	Baik
15.	Televisi Polytron 32"	2015	3.800.000	Baik
16.	Sound System Avino	2015	9.900.000	Baik
17.	Sound System Avino	2020	6.300.000	Baik
18.	Amplifier	2021	884.000	Baik
19.	Loadspeaker	2021	722.000	Baik
20.	Microphone	2021	736.000	Baik
21.	Tangga Aluminium	2017	1.720.000	Baik
22.	Alat Pemadam Portable (2 unit)	2017	1.330.000	Baik
23.	PC Unit Acer (2 unit)	2009	14.000.000	Baik
24.	PC Unit Compaq Pres	2010	7.496.000	Baik
25.	PC Unit	2013	6.958.636	Baik
26.	PC DELL	2017	7.045.000	Baik
27.	Laptop DELL	2014	6.990.000	Baik

No.	Jenis Sarana Prasarana	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
28.	Laptop HP (2 unit)	2016	13.9969.494	Baik
29.	Laptop Asus	2018	6.370.300	Baik
30.	Laptop Lenovo (2 unit)	2020	11.995.400	Baik
31.	Laptop Asus	2021	7.196.000	Baik
32.	Laptop HP (2 unit)	2022	14.605.500	Baik
33.	Laptop HP	2022	7.298.000	Baik
34.	Printer EPSON (2 unit)	2016	4.819.330	Baik
35.	Printer EPSON (2 unit)	2017	6.000.000	Baik
36.	Printer EPSON	2019	2.690.000	Baik
37.	Printer EPSON inkjet color	2020	4.200.000	Baik
38.	Printer EPSON L3210	2022	2.539.000	Baik
39.	Scanner Fujitsu	2020	4.394.900	Baik
40.	Clinical Thermometer	2020	2.500.000	Baik
41.	Kipas angin tornado (4)	2015	2.280.000	Baik
42.	Kipas angin blower (2)	2022	2.726.000	Baik
43.	Kipas angin stand	2022	620.000	Baik
44.	Lemari besi/Metal	2007	1.500.000	Baik
45.	Lemari besi Brother Celia (3 unit)	2014	10.950.000	Baik
46.	Lemari besi Brother (2 unit)	2017	4.500.000	Baik
47.	Lemari Besi/Filling Cabinet Brother (4 unit)	2021	9.444.000	Baik
48.	Rak besi (3 unit)	2021	4.200.000	Baik
49.	Sofa Ruang Camat	2018	6.000.000	Baik
50.	Stationary generating set	2013	9.995.220	Baik
51.	Mesin ketik manual standard (14-16 inc)	1999	1.500.000	Baik
52.	LCD proyektor	2022	6.095.000	Baik
53.	Dispenser	2022	2.784.000	Baik
54.	Gergaji chainsaw	2023	2.600.000	Baik
55.	Alat Peghancur Kertas	2023	3.080.000	Baik
56.	Sound System	2023	5.000.000	Baik
57.	PC Unit (2 unit)	2023	15.400.000	Baik
58.	Sepeda Motor Yamaha All New	2018	19.600.000	Baik

No.	Jenis Sarana Prasarana	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Kondisi
	Soul			
59.	CCTV	2024	4.900.000	Baik
60.	Kursi Rapat (61 buah)	2024	35.075.000	Baik
61.	AC Unit (2 unit) SHARP	2024	13.400.000	Baik
62.	Rak Besi (2 unit)	2024	3.000.000	Baik
63.	Camera Digital	2024	6.000.000	Baik
64.	PC Unit	2024	13.600.000	Baik
65.	Laptop ACER	2024	8.600.000	Baik
66.	Laptop Axioo (2 unit)	2025	16.650.000	Baik
67.	Tangga Aluminium	2025	1.332.000	Baik
68.	Sound System	2025	5.827.500	Baik
69.	Walkie Talkie (2 unit)	2025	2.997.000	Baik

1.5 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, maka isu strategis yang berkaitan dengan Kecamatan Pekalongan Selatan, antara lain:

- a. Optimalisasi pelayanan publik melalui implementasi SOP pelayanan publik, pembinaan sosial budaya, peningkatan stabilitas dan keamanan wilayah, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan kualitas administrasi Kelurahan.
- b. Optimalisasi kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pelaporan dan penerapan sistem pengendalian internal.

BA B II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/*deployment/cascading* dari program serta tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Selatan.

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government		
Tujuan Kota : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Tujuan Kecamatan Pekalongan Selatan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,11
Sasaran Kecamatan Pekalongan Selatan 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,00
Sasaran Kecamatan Pekalongan Selatan 2 : Meningkatkan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	100%
Program Kecamatan Pekalongan Selatan 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%
Program Kecamatan Pekalongan Selatan 2 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100%
Program Kecamatan Pekalongan Selatan 3 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100%
Program Kecamatan Pekalongan Selatan 4 : Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100%
Program Kecamatan Pekalongan Selatan 5 : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 1 : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 2 : Administrasi Keuangan Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 7 : Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 8 : Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 9 : Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 10 : Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	100%
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 11 : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Ketertiban Umum	ketentraman dan ketertiban umum	
Kegiatan Kecamatan Pekalongan Selatan 12 : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Kecamatan Pekalongan Selatan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Target Sasaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	persen	Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan /	Kecamatan Pekalongan Selatan

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
				Kelurahan di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Selatan sebagaimana telah dicantumkan dalam perubahan ketiga perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Target Sasaran Kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	72,50	74,00	75,50	75,80	76,00	76,50
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	persen	100	100	100	100	100	100

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Pekalongan Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Kecamatan Pekalongan Selatan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator	2025		Keterangan
			Satuan	Target	
Tujuan:					
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,11	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi Setda
Sasaran Strategis:					
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,00	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	persen	100	Formulasi : Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan , Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Selatan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator	2025		Keterangan
			Satuan	Target	
Sasaran Program:					
1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Persen	100	Formulasi : Rata-rata persentase ketercapaian kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Selatan
	Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Persen	100	Formulasi : Jumlah Komponen LKK yang Diberdayakan / Jumlah Komponen LKK sesuai peraturan perundangan yang berlaku Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Selatan
	Tercapainya kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Persen	100	Formulasi : Jumlah Kelurahan yang Dilakukan Monev (Patroli) Trantibum / Jumlah Kelurahan Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Selatan
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Persen	100	Formulasi : Rata-rata persentase ketercapaian kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Selatan

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.692.188.000	APBD-P
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.030.000	APBD-P
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 82.388.000	APBD-P
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 266.258.000	APBD-P
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 5.070.000	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Pekalongan Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk:

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan

operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,00	77,15	101,51	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 (satu) target. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100,75% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,30	75,80	77,00	77,15	▲
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	Persen	99,74	99,87	100,05	100	▼

Keterangan:

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yaitu nilai SAKIP OPD, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 selalu mengalami kenaikan. Sedangkan indikator kinerja sasaran meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	77,15	76,50	100,85	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil

Realisasi capaian kinerja utama Kecamatan Pekalongan Selatan tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra, untuk indikator sasaran nilai SAKIP OPD capaiannya 100,85% dengan kategori Sangat Berhasil. Sedangkan indikator sasaran meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum sampai dengan tahun 2025 ketercapaiannya 100% dari target tahun 2026 sebesar 100%.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Propinsi/ Nasional/ Internasional	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	77,15	BB-A	101,51	BB

3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan

Adapun kesimpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,11	99,78	121,52	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel diatas dapat diketahui bahwa target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 (satu) target. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sebesar 121,52% dengan kategori “Sangat Berhasil”.

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif

(sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Adapun realisasi capaian indikator kinerja utama Kecamatan Pekalongan Selatan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,00	77,15	101,51
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	Persen	100	100	100

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	72,80	Indeks	75,80	77,00	76,00	77,15	101,51	76,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Selatan memperoleh nilai 77,15 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Pekalongan Selatan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Selatan ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan).

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Predikat)		BB	

Tabel 3.10 Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
	KOTA PEKALONGAN	73,28
1	BKPSDM	84,00
2	INSPEKTORAT DAERAH	84,75
3	BPKAD	84,60
4	DKP	83,27
5	DINKES	83,25

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
6	DINDUKCAPIL	82,95
7	SETDA	81,85
8	DINDAKOP-UKM	85,70
9	DPMPPA	83,55
10	BAPPERIDA	88,70
11	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	76,65
12	DINSOS P2KB	76,35
13	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	76,50
14	DINPERPA	76,40
15	BAKESBANGPOL	73,75
16	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	76,45
17	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	77,15
18	DPMPTSP	78,00
19	DINDIK	78,50
20	DINPERKIM	74,80
21	DINPERINAKER	75,45
22	DINHUB	77,00
23	SEKRETARIAT DPRD	75,00
24	SEKRETARIAT DPRD	75,50
25	DINARPUS	76,10
26	DINPARBUDPORA	78,15
27	BPBD	76,00
28	DPUPR	83,05
29	DLH	85,95
30	DINKOMINFO	83,50

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, 2025

Analisis keberhasilan capaian kinerja sasaran 1 sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dalam optimalisasi implementasi SAKIP di Kecamatan Pekalongan Selatan.
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder* di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
3. Akuntabilitas kinerja melalui pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Peran APIP dalam memberikan arahan perbaikan apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang pada SKPD.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.442.000	59.822.000	58.622.000	- Perencanaan dan pengukuran kinerja yang terstruktur dan terukur dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. - Penganggaran yang berbasis kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. - Evaluasi capaian kinerja dilaksanakan guna memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.197.272.000	7.160.320.000	6.294.872.431	Pengelolaan keuangan secara transparan, efektif dan efisien akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.790.000	284.244.000	277.388.700	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai dapat meningkatkan kualitas kinerja dan kelancaran kerja pegawai dalam pencapaian target kinerja.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	900.214.000	911.566.000	857.173.605	Tersedianya dukungan jasa penunjang guna keberlangsungan layanan administrasi dan operasional kantor

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Daerah				sehingga dapat mendukung dalam pencapaian target kinerja.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.496.000	1.271.236.000	1.098.818.864	Terselenggaranya pemeliharaan BMD yang memadai dapat mendukung kelancaran pelayanan publik dan pelaksanaan tugas aparatur dalam pencapaian target kinerja.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: 59.822.000 - Realisasi: 58.622.000 (97,99%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 2,01% yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Selisih honor PPTK dan Kasir Kegiatan yang tidak dapat direalisasi dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga pagu belanja yang dikelola turun, honor yang diterimakan juga turun. b. Bantuan transport piket pelayanan masyarakat hari Sabtu yang tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya hari libur nasional pada hari Sabtu sehingga Piket Sabtu ditiadakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah mengoptimalkan SDM bidang lain yang ada tanpa menambah dukungan SDM baru. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dikerjakan oleh tim secara bersama-sama sehingga dapat diselesaikan lebih cepat. - Pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan data/laporan maupun koordinasi internal dan koordinasi dengan sub unit kerja. - Dukungan penggunaan aplikasi SIPD RI dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. - Dukungan penggunaan aplikasi SEKSAMA dalam pelaksanaan evaluasi Renja triwulan serta pengukuran SAKIP.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: 7.160.320.000 - Realisasi: 6.294.872.431 (87,91%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 12,09% yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Gaji pegawai yang tidak dapat terealisasi secara penuh dikarenakan adanya beberapa pejabat struktural yang purna tugas namun tidak langsung diganti secara definitif, adanya beberapa staf yang mutasi dan purna tugas namun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum ada penggantinya. b. Honorarium Penatausahaan Keuangan (honor KPA) yang tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya jabatan Lurah yang belum terisi secara definitif selama 4 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Staf PNS yang mutasi atau purna tugas namun belum ada penggantinya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi digital dalam pengumpulan data/laporan maupun koordinasi internal dan koordinasi dengan sub unit kerja. - Dukungan penggunaan aplikasi SIPD modul penatausahaan dalam pengelolaan keuangan sehingga laporan yang dihasilkan dapat tersaji secara lebih cepat, akurat dan akuntabel.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran: 284.244.000 - Realisasi: 277.388.700 (97,59%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 2,41% yang berasal dari efisiensi pada pengadaan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor serta biaya perjalanan dinas luar daerah. 	-	-

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Anggaran: 911.566.000 - Realisasi: 857.173.605 (94,03%) Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 5,97% yang berasal dari efisiensi pemakaian listrik dan air.	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Anggaran: 1.271.236.000 - Realisasi: 1.098.818.864 (86,44%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 13,56% yang berasal dari: a. Biaya perpanjangan STNK relatif kecil dibandingkan pagu anggaran. b. BBM Lurah yang tidak terserap secara maksimal. c. Adanya selisih lebih harga BBM riil dengan Satuan Standar Harga (SSH). d. Selisih anggaran dengan nilai kontrak yang lebih rendah dan nilainya cukup signifikan pada kegiatan rehabilitasi gedung kantor Kelurahan Sokoduwet.	-	-

Kesimpulan efisiensi:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 1. Penghematan anggaran sebesar 2,01%.
 2. Penggunaan SDM secara optimal tanpa penambahan SDM baru.
 3. Penyusunan dokumen dan laporan lebih cepat selesai karena dikerjakan oleh tim dan dukungan teknologi digital.

Efisiensi ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dapat

melibatkan bidang lain serta memanfaatkan teknologi digital.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Penghematan anggaran sebesar 1,39%.
2. Penggunaan SDM secara optimal tanpa penambahan SDM baru.
3. Penyusunan laporan lebih cepat selesai karena dukungan teknologi digital.

Efisiensi ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan laporan dapat mengoptimalkan SDM yang ada serta memanfaatkan teknologi digital.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh adanya penghematan anggaran sebesar 2,41%.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh adanya penghematan anggaran sebesar 5,97%.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh adanya penghematan anggaran sebesar 13,56%.

SASARAN 2 : Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum

Capaian indikator sasaran Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum	-	Persen	99,87	100,05	100	100	100	100

Indikator “Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Trantibum” merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Analisis keberhasilan capaian kinerja sasaran 2 sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar *stakeholder* di bidang pembangunan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan.
- c. Adanya dukungan yang kuat dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta Anggaran yang digunakan untuk mendukung indikator kinerja:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.600.000	6.850.000	6.849.800	- Kegiatan berupa pelaksanaan Rakor TPPS dan Rembuk Stunting tingkat kecamatan, keberhasilan kegiatan ini akan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien.
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.980.000	2.180.000	2.180.000	- Kegiatan berupa pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan di kelurahan, keberhasilan kegiatan ini akan mendorong terselenggaranya pemerintahan yang tertib, transparan dan akuntabel.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Anggaran: 6.850.000 - Realisasi: 6.849.800 (100%) - Anggaran terealisasi seluruhnya, yang tersisa hanya pembulatan penggandaan Rp. 200, hal ini menunjukkan tidak ada penghematan.	-	-
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Anggaran: 2.180.000 - Realisasi: 2.180.000 (100%) - Anggaran terealisasi seluruhnya, hal ini menunjukkan tidak ada penghematan.	-	-

Kesimpulan efisiensi:

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tidak terdapat efisiensi baik anggaran, SDM maupun waktu.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	40.690.000	35.870.000	35.859.900	- Kegiatan berupa pelaksanaan Musrenbang kecamatan, Fasilitasi kegiatan Karang Taruna, PKK dan TP Posyandu. Keberhasilan kegiatan ini akan mendorong terselenggaranya pemberdayaan masyarakat khususnya di tingkat kecamatan.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	57.350.000	46.518.000	46.515.800	- Kegiatan berupa pelaksanaan distribusi Bansos kematian, fasilitasi Bunda PAUD dan fasilitasi kegiatan masyarakat seperti senam jantung sehat, dan kegiatan lomba-lomba. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Anggaran: 35.870.000 - Realisasi: 35.859.900 (99,97%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,03% yang berasal dari anggaran penggandaan yang tidak terserap dikarenakan pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan.	-	-
Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	- Anggaran: 46.518.000 - Realisasi: 46.515.800 (100%) - Anggaran terealisasi seluruhnya, yang tersisa yaitu penggandaan Rp.2.200, hal ini menunjukkan tidak ada penghematan.	-	-

Kesimpulan efisiensi:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan berjalan dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,03%.

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan tidak terdapat efisiensi baik anggaran, SDM maupun waktu.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	275.300.000	266.258.000	263.391.320	Kegiatan berupa pelaksanaan patroli Trantib, monitoring K3, pengamanan kegiatan di masyarakat, sarasehan K3 dan rakor sinergitas. Kegiatan ini dilaksanakan guna menjaga kondusivitas wilayah di Kecamatan Pekalongan Selatan serta memberikan layanan di bidang ketertiban dan keamanan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Anggaran: 266.258.000 - Realisasi: 263.391.320 (98,92%) - Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,08% yang berasal dari: a. Honor PPTK Pelaksana Tugas Kasi Pemtrantib yang tidak dapat diterimakan dikarenakan pejabat yang bersangkutan sudah menerima honor PPTK. b. Makmin rakor sinergitas yang tidak terserap secara penuh	-	-

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	<p>dikarenakan pelaksanaan kegiatan kondisional (menyesuaikan kebutuhan).</p> <p>c. Selisih lebih anggaran BPJS kesehatan, JKK, JKM dengan yang dibayarkan sehingga tidak dapat terserap secara penuh.</p>		

Kesimpulan efisiensi:

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan berjalan dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 1,08%.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.070.000	5.070.000	5.069.800	- Kegiatan berupa pelaksanaan rapat koordinasi Forkopimcam yang dihadiri 3 (tiga) unsur pimpinan yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil guna membahas permasalahan yang terjadi serta solusi yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan guna mendorong terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Anggaran: 5.070.000 - Realisasi: 5.069.800 (100%) - Anggaran terealisasi seluruhnya, yang tersisa hanya pembulatan penggandaan Rp. 200, hal ini menunjukkan tidak ada penghematan.	-	-

Kesimpulan efisiensi:

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah tidak terdapat efisiensi baik anggaran, SDM maupun waktu.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Pekalongan Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 12.727.958.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 11.609.239.018,- atau sebesar 91,21%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 5.707.610.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.452.799.187,- atau sebesar 95,53%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
	Urusan Kewilayahan			
	<u>Kecamatan Pekalongan Selatan</u>	10.049.934.000	8.946.742.220	89,02
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.687.188.000	8.586.875.600	88,64

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.822.000	58.622.000	97,99
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.124.000	3.124.000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.714.000	1.714.000	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.984.000	53.784.000	97,82
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.160.320.000	6.294.872.431	87,91
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,986,148,000	6.123.100.431	87,65
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD	172.500.000	170.100.000	98,61
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1.672.000	1.672.000	100
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	0	0	0
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	284.244.000	277.388.700	97,59
1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.700.000	5.700.0001	100
2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	122.432.000	115.861.200	94,63
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.400.000	3.400.000	100
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.272.000	11.255.000	99,98
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.650.000	26.595.600	99,80
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.790.000	5.760.000	99,48
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000	8.816.900	97,97
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.566.000	857.173.605	94,03
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000	6.360.000	99,38
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.020.000	98.048.194	72,62
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770.146.000	752.765.411	97,74
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	1.271.236.000	1.098.818.864	86,44

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.736.000	123.444.250	89,62
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.104.500.000	946.819.914	85,72
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.000.000	28,554.700	98,46
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.030.000	9.029.800	100
I	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.850.000	6.849.800	100
1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.850.000	6.849.800	100
II	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.180.000	2.180.000	100
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.180.000	2.180.000	100
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	82.388.000	82.375.700	99,99
I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	35.870.000	35.859.900	99,97
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	35.870.000	35.859.900	99,97
II	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	46.518.000	46.515.800	100
1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	46.518.000	46.515.800	100
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	266.258.000	263.391.320	98,92
I	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	266.258.000	263.391.320	98,92

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	266.258.000	263.391.320	98,92
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.070.000	5.069.800	100
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.070.000	5.069.800	100
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.070.000	5.069.800	100
	<u>Kelurahan Jenggot</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	468.057.000	467.799.877	99,95
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	468.057.000	467.799.877	99,95
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	12.500.000	100
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	164.244.000	164.069.257	99,89
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291.313.000	291.230.620	99,97
	<u>Kelurahan Buaran Kradenan</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	485.157.000	484.422.240	99,85
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	485.157.000	484.422.240	99,85
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.499.800	12.499.800	100
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	185.144.000	184.436.840	99,62
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	287.513.000	287.485.600	99,99
	<u>Kelurahan Kuripan Kertojarjo</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	418.591.000	417.224.690	99,67
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	418.591.000	417.224.690	99,67
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	12.500.000	100
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	183.244.000	181.880.890	99,26
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	222.847.000	222.843.800	100
	<u>Kelurahan Kuripan Yosorejo</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat	474.772.000	473.385.451	99,71

No	Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp)	%
	Desa Dan Kelurahan			
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	474.772.000	473.385.451	99,71
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	11,500,000	92,00
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	192.004.000	191.618.251	99,80
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	270.268.000	270.267.200	100
	<u>Kelurahan Sokoduwet</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	391.336.000	388.023.650	99,15
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	391.336.000	388.023.650	99,15
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	12.500.000	100
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	131.882.000	128.635.850	97,54
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	246.954.000	246.887.800	99,97
	<u>Kelurahan Banyurip</u>			
A	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	440.111.000	435.096.890	98,86
I	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	440.111.000	435.096.890	98,86
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	12.500.000	12.500.000	100
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	135.882.000	132.966.690	97,85
3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	291.729.000	289.630.200	99,28

3.4 Prestasi Yang Diraih

Pada tahun 2025 Kecamatan Pekalongan Selatan telah meraih beberapa penghargaan antara lain:

1. Dalam tiga tahun berturut-turut Kecamatan Pekalongan Selatan meraih prestasi yang membanggakan yaitu masuk 5 (lima) besar dalam penilaian kearsipan di tingkat Kota Pekalongan. Pada Tahun 2025, Kecamatan Pekalongan Selatan meraih peringkat 2 dalam audit kearsipan internal sebagai Perangkat Daerah dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) yaitu dengan nilai 93,69.



Gambar 3.1 Piagam Penghargaan dalam Pengawasan Internal Kearsipan Tahun 2025

2. Kampung KB Utama Mandiri Kelurahan Jenggot menerima penghargaan sebagai Peringkat I Kategori Kota dalam Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.2 Piagam Penghargaan Lomba Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas

3. Kampung KB Utama Mandiri Kelurahan Jenggot mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam lomba Kampung KB Tingkat Nasional dan meraih penghargaan sebagai Juara Harapan I Kampung Keluarga Berkualitas Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2025.



Gambar 3.3 Piagam Penghargaan Lomba Kampung KB Tingkat Nasional

4. Kelurahan Kuripan Yosorejo menerima penghargaan sebagai Juara III Kategori Kelurahan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.4 Piagam Penghargaan Lomba Desa dan Kelurahan

5. Rumah Dataku Kampung KB Urip Rejo Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan meraih penghargaan sebagai Juara III dalam Lomba Apresiasi Rumah Dataku (Kategori Digital) Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.5 Piagam Penghargaan Lomba Apresiasi Rumah Dataku (Kategori Digital)

6. Kampung KB Utama Mandiri Kelurahan Jenggot menerima penghargaan sebagai Juara I dalam Evaluasi dan Pembinaan/Lomba Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) Sinergi dan Kolaborasi dengan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) Tingkat Kota Pekalongan.



Gambar 3.6 Piagam Penghargaan Lomba Evaluasi dan Pembinaan/Lomba Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) Sinergi dan Kolaborasi dengan KRPPA

7. Kelompok Tani Subur Panguripan Kelurahan Jenggot menerima penghargaan sebagai Peringkat I dalam Lomba Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tingkat Polres Pekalongan Kota.



3.7 Piagam Penghargaan Lomba Pekarangan Pangan Bergizi (P2B)

8. PKK Kelurahan Jenggot menerima penghargaan sebagai Peringkat I dalam Lomba Beberan “2025” Pola Asuh Anak dan Remaja yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Pekalongan.



3.8 Piagam Penghargaan Lomba Beberan “2025” Pola Asuh Anak dan Remaja

9. Bank Sampah Berkah Kelurahan Jenggot menerima penghargaan sebagai Terbaik II dalam Lomba Bank Sampah dan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) yang diselenggarakan oleh TP PKK Kota Pekalongan.



3.9 Piagam Penghargaan Lomba Bank Sampah dan Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB)

10. TPS3R Berkah Lestari Kelurahan Jenggot menerima penghargaan sebagai Peringkat II TPS3R Terbaik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.



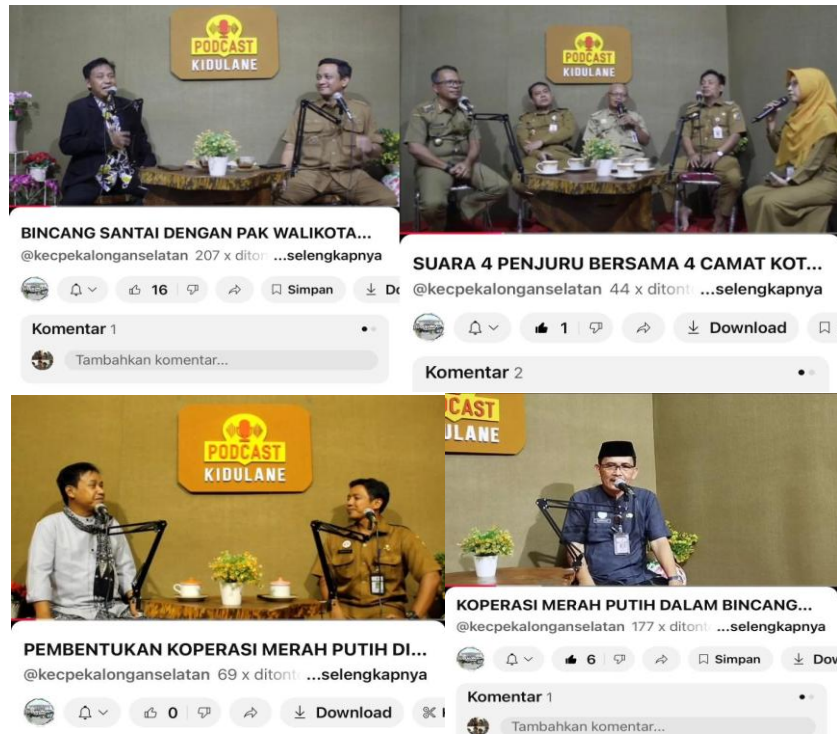
3.10 Piagam Penghargaan Lomba TPS3R

3.5 Inovasi

Pada tahun 2025 Kecamatan Pekalongan Selatan telah mengembangkan beberapa inovasi antara lain:

1. PODCAST KIDULANE

Podcast Kidulane merupakan salah satu inovasi digital Kecamatan Pekalongan Selatan yang dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan media komunikasi publik berbasis digital yaitu sebagai sarana penyampaian informasi, edukasi dan publikasi kepada masyarakat secara lebih modern sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses. Melalui Podcast Kidulane diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi pemerintahan baik kegiatan, program maupun kebijakan-kebijakan Kecamatan Pekalongan Selatan secara lebih efektif sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.



Gambar 3.11 Podcast Kidulane

2. PAPKESEL

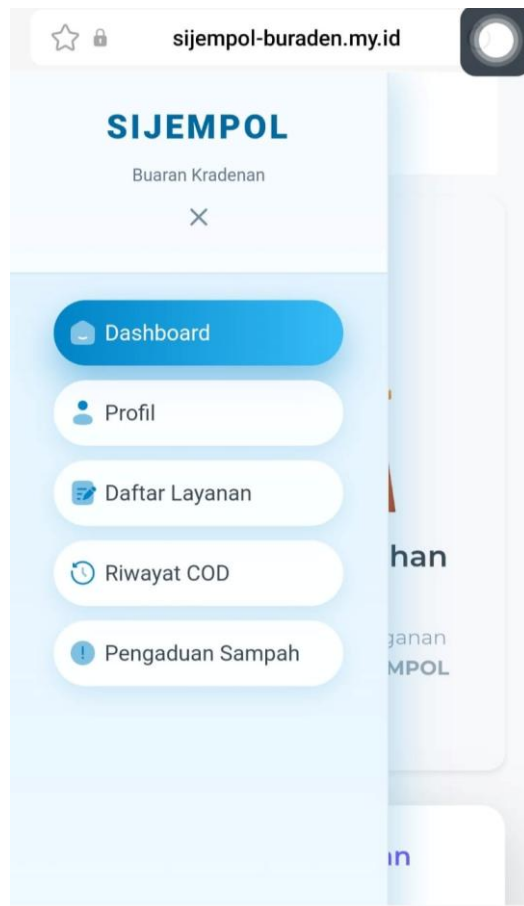
PAPKESEL (Platform Aduan Patroli Kecamatan Pekalongan Selatan) merupakan inovasi administratif berbasis digital yang dirancang untuk menjawab masalah utama yaitu tidak adanya mekanisme pembaharuan data titik rawan keamanan dan ketertiban secara sistematis sehingga kegiatan patroli menjadi tidak efektif.



Gambar 3.12 Platform PAPKESEL

3. SIJEMPOL BuraDen

SIJEMPOL BuraDen (Sistem Informasi Jemput Pola Lingkungan Kelurahan Buaran Kradenan) merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu pengelolaan data warga, pembayaran iuran sampah, pengaduan warga, serta monitoring layanan kebersihan.



Gambar 3.13 SIJEMPOL BuraDen

B A B I V

P E N U T U P

4.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, pada tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan nilai AKIP 77,15 dan ketercapaian 101,51%.
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan Trantibum dengan ketercapaian 100%.

Pelaksanaan program dan kegiatan TA. 2025 di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 12.727.958.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.609.239.018,- (Sebelas milyar enam ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan belas rupiah) atau sekitar 91,21%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 SiLPA Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan 8,79% atau sebesar

Rp.1.118.718.982,00,- (Satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan belas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), telah mewujudkan capaian kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan dalam upaya menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan 2021-2026. Pagu belanja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan diluar belanja gaji dan tunjangan Tahun 2025 sebesar Rp. 5.707.610.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.5.452.799.187,- atau 95,53%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait serta masyarakat yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

4.2 Permasalahan dan Langkah Kedepan

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pekalongan Selatan dalam rangka pencapaian kinerja yaitu:

1. Terbatasnya SDM yang kompeten baik di kecamatan maupun kelurahan.
2. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik melalui pembangunan telah didukung oleh perencanaan atau pengajuan anggaran yang tepat, tetapi belum terealisasi maksimal karena adanya rasionalisasi anggaran sehingga keberadaan sarana dan prasarana pada ruang pelayanan masih belum optimal.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan guna pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, langkah kedepan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Terus mendorong dan mengoptimalkan pelayanan publik khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan dengan sumber daya yang tersedia.
2. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Pekalongan Selatan melalui bimtek, diklat, dll.

3. Meningkatkan koordinasi dengan *steakholder* guna menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan.
4. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian target terhadap indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan target. Semoga kinerja Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan yang sudah baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja di masa yang akan datang lebih baik lagi.

Pekalongan, 25 Februari 2026



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	72,50	72,50	74,00	75,50	75,80	76,00	76,50	Inspektorat Daerah	Kecamatan Pekalongan Selatan
2	Meningkatnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan dan trantibum	Persen	Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan Tahun N	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	-	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pekalongan Selatan	Kecamatan Pekalongan Selatan

Pekalongan, 9 Desember 2024

Camat Pekalongan Selatan
Kota Pekalongan



ZAENAL MUHIBBIN, S.Pd.
NIP. 19670609 199103 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUMADI, S.I.P.**

Jabatan : **Camat Pekalongan Selatan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

Camat Pekalongan Selatan



SUMADI, S.I.P.

NIP. 19691217 199103 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Kecamatan Pekalongan Selatan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,11	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,00	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	100 Persen	Formulasi : Rata-Rata dari Tingkat Capaian Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemeritahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Trantibum di Wilayah Selatan, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Selatan
Sasaran Program :				
1.	Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di	100 Persen	Formulasi : Rata-rata persentase ketercapaian kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Selatan

		Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		
2.	Terwujudnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	Formulasi : Jumlah Komponen LKK yang Diberdayakan / Jumlah Komponen LKK sesuai peraturan perundangan yang berlaku Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Selatan
3.	Tercapainya kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	Formulasi : Jumlah Kelurahan yang Dilakukan Monev (Patroli) Trantibum / Jumlah Kelurahan Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Selatan
4.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan	100 Persen	Formulasi : Rata-rata persentase ketercapaian kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kecamatan Pekalongan Selatan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.692.188.000,-	APBD-P
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 9.030.000,-	APBD-P
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 82.388.000,-	APBD-P

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rp. 266.258.000,-

APBD-P

Rp. 5.070.000,-

APBD-P

